

Panduan Praktis

Operasional Pengelolaan

Pengetahuan SDGs Indonesia

Untuk Mendukung

Pelokalan SDGs



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2024**



Kementerian PPN/
Bappenas

Panduan Praktis

Operasional Pengelolaan Pengengahuan SDGs
Indonesia Untuk Mendukung Pelokalan SDGs



Panduan Praktis

Operasional Pengelolaan Pengetahuan SDGs Indonesia Untuk Mendukung Pelokalan SDGs



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyelaras Akhir : Vivi Yulaswati, Yanuar Nugroho

Reviewer : Pungkas Bahjuri Ali, Yanuar Nugroho

Tim Penyusun : Rachman Kurniawan, Sanjoyo, Setyo Budiantoro, Gantjang Amanulah, Lingga Kartika Suyud, Zulazmi, Marvel Josef Petrus Ledo, Alimatul Rahim, Fitriyani Yasir, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Diyabareswati, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Anggita Sulisetiasih, Ardhiantie, Diky Avianto, Adenira Hargianintya, Prayoga Dahirsa, Nacota Yasihuda

Tim Pendukung : Eneng Fathonah, Fredrick Ellia Gugkang, Yoakim Asy, Boby Rantow Payu, Anita Wahyuni, Abdul Halim, Hapsari Octaviani.

Layout/Desain : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Pengelolaan pengetahuan menjadi semakin penting dalam era pembangunan berkelanjutan. Sebagai konsep yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan berbagi pengetahuan dan informasi, pengelolaan pengetahuan sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang memerlukan inovasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis.

Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan kita dan membuat keputusan yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini memerlukan pengetahuan yang tepat dan *up-to-date* tentang praktik dan teknologi yang berkelanjutan serta pemahaman tentang dampak yang dihasilkan dari tindakan kita.

Dalam konteks ini, pengelolaan pengetahuan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang relevan tersedia untuk semua pihak yang terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, pengelolaan pengetahuan dapat membantu memfasilitasi kolaborasi antara organisasi dan individu dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kata pengantar ini, saya akan membahas tentang peran pengelolaan pengetahuan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan bagaimana pengelolaan pengetahuan dapat membantu kita untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya juga akan membahas mengenai bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengelolaan pengetahuan dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Jakarta, Mei 2024



Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan,
selaku Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Gambar	IV
Daftar Tabel	V
Daftar Singkatan	VI

PENDAHULUAN	1
--------------------	---

1	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tentang Panduan Ini	4

PENGANTAR TENTANG PENGELOLAAN PENGETAHUAN SDGs	5
---	---

2	
2.1. Definisi Pengelolaan Pengetahuan	7
2.2. Strategi Pengelolaan Pengetahuan SDGs	7
2.3. Pengertian Knowledge Hub SDGs	9
2.3.1. Definisi	9
2.3.2. Prinsip-Prinsip Knowledge Hub SDGs	10
2.3.3. Pelaksana Penanggung Jawab	10
2.3.4. Peran dan Fungsi Knowledge Hub SDGs	11
2.3.5. Komponen Inti (<i>Enabling Factors</i>)	13
2.4. Contoh Knowledge Hub SDGs	14

OPERASIONALISASI KNOWLEDGE HUB SDGs	17
--	----

3	
3.1. Administrasi dan Registrasi	19
3.2. Inventarisasi Aktor dan Jejaring SDGs	20
3.3. Penyediaan dan Pengumpulan Referensi Tentang SDGs	20
3.4. Mengelola komunikasi dan relasi antara aktor dan dengan jejaring	21
3.5. Edukasi SDGs	21

3.6. Diseminasi SDGs	22
3.7. Validasi Informasi	23

MONITORING DAN EVALUASI KNOWLEDGE HUB SDGs

25

4

KEBERLANJUTAN KNOWLEDGE HUB SDGs

29

5

5.1. Rencana Kerja dan Anggaran	31
5.2. Dukungan Politik	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Pelaksanaan SDGs	7
Gambar 2. Aspek Pengelolaan Pengetahuan SDGs	8
Gambar 3. Halaman depan website SDGs Indonesia	14
Gambar 4. Menu dokumen-dokumen referensi SDGs	15
Gambar 5. Dokumen-dokumen referensi SDGs: regulasi SDGs	15
Gambar 6. Dokumen referensi SDGs: RAD tiap provinsi	15
Gambar 7. Dokumen referensi SDGs lainnya	15
Gambar 8. Dashboard SDGs berisi data-data termutakhirkan	16
Gambar 9. Menu praktik baik SDGs berdasarkan kategori	16
Gambar 10. Artikel berisi kabar terkini SDGs Indonesia di panggung nasional maupun global	16
Gambar 11. Operasionalisasi <i>Knowledge Hub</i> SDGs	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh daftar pertanyaan validasi pengetahuan SDGs

23

DAFTAR SINGKATAN

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

IISD

International Institute for Sustainable Development

KH

Knowledge Hub

KM

Knowledge Management

MSP

Multi-Stakeholder Partnerships

NSA

Non-State Actor

NTT

Nusa Tenggara Timur

OPD

Organisasi Perangkat Daerah

PBB

Persatuan Bangsa-Bangsa

SA

State Actor

SDGs

Sustainable Development Goals

SDGs KH

Sustainable Development Goals Knowledge Hub

SDGs KM

Sustainable Development Goals Knowledge Management

TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UNDESA

United Nations Department of Economic and Social Affairs

VLR

Voluntary Local Review

VNR

Voluntary National Review

VSR

Voluntary Subnational Review



1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sejak diadopsinya Agenda 2030 bagi Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015, telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai aktor di Indonesia dalam mendukung 17 tujuan SDGs. Kontribusi-kontribusi tersebut merupakan pengalaman praktis yang berharga dari para aktor pemerintah dan nonpemerintah. Pengalaman-pengalaman tersebut masih belum tersebarluas, cenderung tersimpan dalam ingatan pelaku atau organisasi. Sementara itu, masih banyak pihak yang belum mengenal SDGs sehingga tidak berkontribusi dan tidak saling mengenal aktor yang telah memberikan kontribusi. Baik aktor maupun koordinator SDGs juga belum sepenuhnya menyebarluaskan atau memanfaatkan pengalaman praktis dari pelaksanaan SDGs, belum saling mengenal atau belajar dari pengalaman satu sama lain, yang umumnya disebabkan oleh beban kerja. Selain itu, peran para aktor nonpemerintah yang telah berkontribusi dan berdampak terhadap capaian SDGs juga perlu lebih banyak dipromosikan dan dijadikan referensi dalam perencanaan pembangunan.

Hal ini menjadi sorotan dalam **pelokalan SDGs**, di mana praktik-praktik baik¹ dari para aktor di lapangan kurang dipromosikan. Sementara itu pengelola SDGs di tingkat nasional memerlukan informasi terbaru tentang capaian-capaian SDGs di tingkat daerah, praktik-praktik yang sudah dilakukan dan dapat direplikasi, tantangan maupun hambatan dalam pelaksanaan SDGs. Pengalaman dan pembelajaran ini merupakan aset pengetahuan daerah dan bangsa yang berisiko hilang bila tidak didokumentasikan atau dimanfaatkan. Sementara itu, selain untuk mencapai seluruh target SDGs, Road Map SDGs Indonesia juga menyebutkan kebutuhan pendanaan dan keberkaitan antara satu sama lain tujuan dan indikator SDGs.

Untuk itu, perlu ada mekanisme koordinatif antara tingkat nasional dan daerah dalam penyebaran dan pemanfaatan pembelajaran SDGs sehingga mendorong lebih banyak aktor untuk berkontribusi dan tereduksi tentang SDGs. Fungsi ini dapat didukung oleh suatu *knowledge hub* untuk menggerakkan pengelolaan pengetahuan, antara lain menyediakan informasi dan referensi terbaru terkait SDGs, sarana untuk belajar dan berbagi, serta hal lainnya yang secara terbuka dapat diakses oleh publik. Di tingkat nasional, Sekretariat Nasional SDGs Bappenas telah menjalankan fungsi sebagai *knowledge hub* SDGs yang menjembatani penyebaran pengetahuan di tingkat nasional secara menyeluruh dan tingkat global. Kinerja dan fungsi *knowledge hub* SDGs nasional tersebut perlu dukungan dari tingkat daerah sehingga perlu didorong agar terbentuknya *knowledge hub* SDGs tingkat daerah.

¹ Pengalaman praktis dari para aktor yang telah terbukti berhasil memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, memenuhi prinsip-prinsip SDGs, dan dapat direplikasi oleh aktor lain, tentang bagaimana SDGs telah dilaksanakan di tingkat-tingkat subnasional perlu dipromosikan secara lebih luas.

Untuk itu, dibuat Panduan Teknis Operasionalisasi Pengelolaan Pengetahuan SDGs Indonesia untuk Mendukung Pelokalan SDGs.

1.2. Tentang Panduan Ini

Panduan ini menyajikan langkah-langkah praktis dalam mengelola pengetahuan SDGs melalui sebuah *knowledge hub*, dilengkapi dengan format-format dasar tahapan teknis yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Rujukan kebijakan yang digunakan dalam penyusunan konsep dan panduan ini adalah Perpres No. 59 Tahun 2017, Perpres No. 111 Tahun 2022, Panduan Monitoring dan Evaluasi Edisi 2 Form 6 Praktik Baik dan Strategi Komunikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Rujukan teknis pengelolaan pengetahuan yang digunakan adalah *The Art of Knowledge Exchange and Capturing Solutions for Learning and Scaling Up dari Bank Dunia, SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learned in SDG implementation - SECOND EDITION* dari PBB, serta website SDGs Indonesia, UNDESA PBB, dan IISD.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan panduan praktis dalam mengoperasionalisasikan sebuah *knowledge hub* SDGs, yang termasuk:

1. Inventarisasi pengetahuan SDGs;
2. Pemanfaatan pembelajaran dan pengalaman pelaksanaan SDGs;
3. Penyebaran dan pertukaran pengetahuan SDGs;
4. Keterlibatan inklusif dan transparan dari para aktor;
5. Pendokumentasian dan pengumpulan praktik baik SDGs.

Sasaran utama pengguna panduan ini adalah pengelola SDGs di tingkat nasional dan provinsi, misalnya tim koordinasi atau sekretariat, yang telah diberi mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs Indonesia sesuai Perpres No. 2017/59 dan Perpres No. 2022/111. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya *knowledge hub* SDGs lain yang menggunakan panduan ini, seperti lembaga nonpemerintah atau pengelola SDGs di tingkat kabupaten/kota.

Panduan ini dibagi ke dalam enam (6) bagian: bagian 3-1 memberikan pengantar tentang latar belakang dan terminologi yang berhubungan dengan pengelolaan pengetahuan dan SDGs. Bagian 4 menjelaskan tahapan dalam operasionalisasi *knowledge hub* SDGs dalam konteks mengkoordinasikan proses penyebaran dan pertukaran pengalaman SDGs. Bagian 5 memberikan perspektif bagi keberlanjutan *knowledge hub* SDGs dan Lampiran menyertakan format-format serta bahan bacaan yang dapat digunakan dalam operasionalisasi *knowledge hub* SDGs.



2

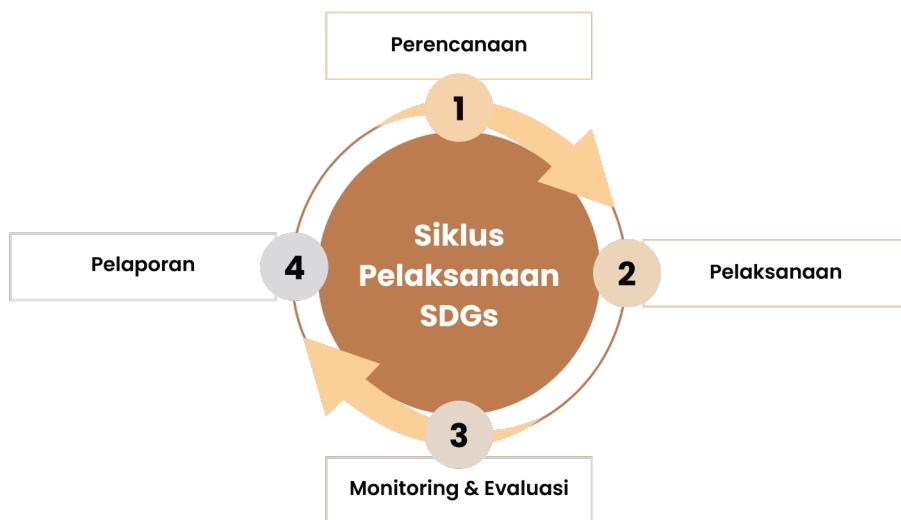
PENGANTAR TENTANG PENGELOLAAN PENGETAHUAN SDGs



2.1. Definisi Pengelolaan Pengetahuan

Pengelolaan pengetahuan SDGs adalah proses pembuatan, penyebaran, pemanfaatan pengetahuan untuk mendukung praktik-praktik SDGs. Hal ini meliputi identifikasi, pendokumentasian, dan penyebaran praktik-praktik baik, pembelajaran, serta solusi inovatif terkait pembangunan berkelanjutan, termasuk regulasi, panduan teknis, edukasi. Pengelolaan pengetahuan SDGs dapat membantu lembaga pelaku SDGs membuat keputusan berbasis pengetahuan secara lebih efektif dan efisien, serta mempromosikan praktik-praktik SDGs.

Pengelolaan pengetahuan SDGs bersinergi dengan dan mendukung siklus pelaksanaan SDGs, yakni perencanaan (pengetahuan SDGs melengkapi referensi untuk mendukung proses penyusunan rencana aksi), pelaksanaan (portofolio aktor menjadi kredensial dalam proses pembentukan kerjasama multi pihak), monitoring dan evaluasi (penyampaian data, laporan monev), dan pelaporan (laporan tahunan, praktik baik).



Gambar 1. Siklus Pelaksanaan SDGs

2.2. Strategi Pengelolaan Pengetahuan SDGs

Sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs, pembangunan harus (1) universal, (2) terintegrasi, (3) inklusif, dan (4) tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*). Laporan Bank Dunia tahun 2015 mencatat bahwa pembangunan Indonesia masih harus lebih inklusif. Walaupun telah banyak pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang berpartisipasi terhadap pembangunan, pelibatan dan partisipasi masyarakat

perlu didorong untuk lebih konkrit dan mendukung capaian SDGs.² Ini adalah salah satu pentingnya pengetahuan SDGs dikelola dengan lebih baik karena besar kemungkinan aktor-aktor pembangunan telah berkontribusi terhadap capaian SDGs namun belum terdata sebagai kontributor SDGs. Namun demikian, tidak setiap pengetahuan harus dikelola. Perlu ada koridor serta koordinasi dalam mengelola pengetahuan SDGs.

Indonesia menggunakan tiga (3) aspek berikut dalam mengelola pengetahuan SDGs:



Gambar 2. Aspek Pengelolaan Pengetahuan SDGs

Ketiga aspek pengetahuan SDGs di atas menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu pengetahuan perlu dikelola atau sebatas informasi untuk disimpan. Sebagai contoh, salah satu isu sosial-ekonomi yang ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kemiskinan ekstrim. Di tingkat global, isu kemiskinan ekstrim pun ditemukan di banyak negara. Untuk itu, upaya Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT dalam menyelesaikan isu kemiskinan ekstrim melalui pelibatan petani lokal dalam peningkatan ketahanan pangan memenuhi aspek termutakhiran. Selanjutnya, aplikasi sederhana digunakan untuk memantau panen dan pasar sehingga memenuhi aspek inovatif. Hasil dari upaya tersebut melahirkan petani-petani baru, bahkan kaum pemuda dan perempuan, yang berhasil meningkatkan

2 The 2015 World Bank report mentioned that Indonesia's economic growth has been enjoyed by the top %20 of the consumer class. Indonesia needs to put a more attention on an inclusive development agenda in the future. Therefore, all Indonesian people could contribute to and benefit from the economic development. Greater participation from all stakeholders is required to ensure Indonesia's economic development be more inclusive and improving people's welfare. Nevertheless, the stakeholders'engagement and participation in achieving the Indonesian development agenda should be translated into concrete actions and aligned with the Sustainable Development Agenda,represented by the 17 goals. [Roadmap of SDGs Indonesia, hal. xi, Introduction: Economic Development Progress]

kesejahteraan mereka serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan anggaran daerah. Hal tersebut memenuhi aspek berdampak.

Selanjutnya, dalam mengelola pengetahuan, perlu ada koordinasi yang dapat beroperasi secara otomatis, dengan atau tanpa adanya suatu lembaga koordinasi. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui sebuah *knowledge hub* SDGs.

2.3. Pengertian *Knowledge Hub* SDGs

2.3.1. Definisi

Knowledge hub SDGs adalah sebuah sarana atau pusat repository yang menghubungkan aktor lembaga maupun individu dengan informasi dan pengetahuan tentang SDGs. Sarana tersebut dapat berupa platform daring yang secara otomatis menyajikan referensi dan pengetahuan SDGs bagi para anggota yang telah terregistrasi. Setiap anggota *knowledge hub* dapat menyebarkan dan mempromosikan pengetahuan yang dimilikinya, sekaligus menggunakan informasi yang ada untuk kebutuhannya. *Knowledge hub* SDGs dapat menyediakan beragam referensi, seperti kajian, hasil riset, praktik baik, modul pelatihan, template, serta materi-materi edukasi untuk peningkatan kapasitas, dan sebagainya.

"Knowledge hubs are institutions or networks, dedicated to capture, share and exchange development experiences with national and international partners in order to accelerate development." - Communique of the Bali High Level Meeting "Towards Country-led Knowledge Hubs" - July 2012.

[*Knowledge hub* adalah lembaga atau jejaring, yang didedikasikan untuk menangkap, berbagi, dan bertukar pengalaman pembangunan dengan mitra-mitra kerja nasional dan internasional untuk mempercepat pembangunan.

- Komunike Pertemuan Tingkat Tinggi Bali "Menuju *Knowledge Hub* berbasis Negara" - Juli 2012]

(<https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/knowledge-hubs.html>)

"Knowledge hubs are information networks that are dedicated to fostering knowledge sharing within peer groups. Knowledge hub docs may be different, but the goals are similar - for new hires to feel welcomed and onboard efficiently, team members to be aligned, and everyone to have a space for shared understanding and ongoing learning."

[*Knowledge hub* adalah jaringan informasi yang didedikasikan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dengan kelompok-kelompok yang sepemikiran. Dokumen-dokumen *knowledge hub* berbeda-beda, namun tujuannya sama - yakni agar anggota baru merasa diterima dan dapat langsung bekerja secara efisien, anggota tim bekerja secara selaras, dan semua memiliki ruang untuk memiliki pemahaman yang sama dan pembelajaran yang berjalan.] (<https://coda.io/@john/khub>)

Pengetahuan SDGs yang dikelola oleh sebuah *knowledge hub* SDGs adalah pengetahuan lokal Indonesia, termasuk kearifan lokal, yakni "pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam komunitas atau organisasi tertentu yang diakumulasikan dari waktu ke waktu melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar mereka. Pengetahuan lokal sering berhubungan dengan subjek yang sama dengan penelitian ilmiah. Namun, pengetahuan lokal memiliki perspektif, makna dan pemahaman yang berbeda yang didasarkan pada konteks lokal dan dibentuk oleh interaksi manusia dengan lingkungan fisik di sekitarnya.³ Hal ini penting mengingat kayanya pengetahuan lokal yang dimiliki Indonesia yang tersebar di 38 provinsi beserta kabupaten/kota dan desa serta budaya yang telah mengajarkan pengetahuan praktis secara turun temurun.

2.3.2. Prinsip-Prinsip *Knowledge Hub* SDGs

Selaras dengan prinsip-prinsip SDGs dan konsep pengelolaan pengetahuan, berikut adalah prinsip-prinsip *knowledge hub* SDGs:

1. Inklusif dan berperikeadilan sosial, yang sesuai dengan prinsip SDGs, *no one left behind*;
2. Bersinergi dengan program kerja lembaga sehingga menjadi bagian dari pelaksanaan operasional dan budaya kerja personil;
3. Koordinatif dan komunikatif, bekerja bersama dengan unit lain secara internal lembaga maupun eksternal;
4. Berfokus pada manusia (*human-centered*) dan peningkatan kualitas hidup manusia berdasarkan pembelajaran orang dewasa yang berbasis pengalaman hidup dan pengetahuan, didorong keinginan untuk mencari informasi dan membuat keputusan sendiri⁴;

3 Pentingnya Pengetahuan Lokal; Knowledge Sector Initiative; 2018; hal. 3

4 <https://www.ispringsolutions.com/blog/adult-learning-theories>

5. Terbuka, mudah, dan praktis digunakan;
6. Terverifikasi dan tervalidasi.

2.3.3. Pelaksana Penanggung Jawab

Knowledge hub SDGs secara fungsi yang luas dan aktif idealnya berada di bawah koordinasi pemerintah yang telah membentuk tim koordinasi dan/atau sekretariat SDGs. Hal ini agar semua aktor, sektor, maupun isu ternaungi, netral dan cepat dalam menjembatani komunikasi resmi terkait SDGs antara tingkat nasional dan global.

Dalam kondisi tidak ada tim koordinasi atau sekretariat SDGs, pemerintah daerah tingkat provinsi yang ditugaskan untuk mengoordinasikan SDGs dapat menjalankan fungsi *knowledge hub* dengan berkoordinasi dengan unit-unit terkait secara internal maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tidak menutup kemungkinan aktor nonpemerintah juga mendirikan *knowledge hub* SDGs, antara lain perguruan tinggi, parlemen, lembaga swadaya masyarakat, atau lainnya, yang berfokus pada isu-isu tematik secara khusus. *Knowledge hub* tematik tersebut berkoordinasi dengan *knowledge hub* SDGs pemerintah dalam mengelola pengetahuan SDGs.

2.3.4. Peran dan Fungsi *Knowledge Hub* SDGs

Knowledge hub SDGs berperan sebagai SDGs pool of knowledge (pusat kumpulan pengetahuan SDGs), bersinergi dengan siklus pelaksanaan SDGs serta menyambungkan komunikasi dan koordinasi antara tingkat nasional dan daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya dan platform yang ada, seperti personil dan website, *knowledge hub* SDGs menjadi media bagi pertukaran dan berbagi pengetahuan berbasis pengalaman dan pembelajaran antara para aktor, termasuk *knowledge hub* lain dan aktor nonpemerintah.

"...masih ada kecenderungan untuk menerima asumsi dasar bahwa pengetahuan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik adalah pengetahuan ilmiah. ...ini adalah pandangan sempit yang mengabaikan realitas mengenai bagaimana pengetahuan dihasilkan dan digunakan. Tanpa memandang pengetahuan secara lebih luas seperti ini, pengetahuan ilmiah dapat jatuh di telinga yang tidak bisa mendengar." [Pentingnya Pengetahuan Lokal; Knowledge Sector Initiative; 2018; hal. 11]

Knowledge hub SDGs juga mendukung implementasi strategi komunikasi SDGs Indonesia dalam meningkatkan kesadaran, minat, dan pertukaran pengetahuan

SDGs dengan menyambungkan para aktor yang memerlukan dan memiliki solusi, serta memberikan informasi terkait kebijakan SDGs terbaru dan isu-isu pembangunan terkini. *Knowledge hub* SDGs memanfaatkan pengetahuan yang ada dan tidak menghapus ajang atau insentif pengelolaan pengetahuan yang telah ada, seperti Inovasi, sehingga mengadvokasi pemahaman dan kontribusi dalam SDGs.

Menggunakan *knowledge hub*, para aktor SDGs diajak untuk bersama-sama menjawab beragam tantangan pembangunan, membangun aksi bersama melalui kemitraan multipihak⁵, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan tahunan dan *Voluntary Local Review* (VLR)⁶.

Fungsi-fungsi *knowledge hub* SDGs dalam siklus pelaksanaan SDGs secara garis besar antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang SDGs dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang SDGs, termasuk ke SA di OPD dan kabupaten/kota, dan NSA;
2. Mengoordinasikan pengumpulan dan validasi praktik baik SDGs untuk dipublikasikan sebagai aset pengetahuan daerah dan nasional;
3. Mengoordinasi terkumpulnya dan tersebarnya praktik-praktik baik SDGs dari para aktor, misalnya sinergi dengan kegiatan lain untuk mempromosikan praktik baik;
4. Memfasilitasi komunikasi antara para aktor, termasuk NSA dan SA di kabupaten/kota, misalnya dalam *community of practice*, forum-forum informal seperti 'Ngopi Bareng', workshop/seminar/webinar tematik dengan narasumber ternama, dll;
5. Menentukan bidang-bidang yang akan dilibatkan dalam membentuk MSP dan memfasilitasi terbentuknya MSP di bidang-bidang tersebut berdasarkan data aktor dan praktik baik yang ada;
6. Menjalin kerjasama dengan mitra-mitra NSA dalam dan luar negeri untuk peningkatan kapasitas SDGs dan bidang-bidang atau sektor khusus yang berkaitan dengan SDGs;
7. Menginformasikan progres data SDGs kepada publik dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum;
8. Memanfaatkan praktik-praktik baik SDGs dalam pengembangan pembangunan untuk percepatan progres SDGs;
9. Menggunakan laporan tahunan SDGs, termasuk VNR dan VLR, sebagai refleksi dan pembelajaran untuk perencanaan pembangunan selanjutnya;
10. Mempromosikan daerah melalui praktik-praktik baik yang ada dan mendorong terjadinya replikasi praktik baik;

5 Tata cara pembentukan kemitraan multi pihak dijelaskan dalam Panduan Kemitraan Multipihak.

6 Tata cara monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan tahunan dan VLR dijelaskan dalam Panduan Monitoring dan Evaluasi SDGs dan Panduan Laporan Tahunan dan VLR SDGs.

11. Mendorong terbentuknya jejaring pengetahuan dan kemitraan antar para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target SDGs;

Sebagai contoh Sekretariat SDGs Kaltara berkoordinasi dengan SDGs Center Unikaltar untuk membantu Sekretariat mengumpulkan praktik baik bersamaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus.

2.3.5. Komponen Inti (*Enabling Factors*)

Berikut adalah kondisi pendukung yang harus ada: - Ada minimal satu orang pemimpin penuh waktu untuk memfasilitasi community of practice - Suatu komitmen pendanaan untuk minimal tiga tahun agar bergerak dari konseptual menjadi model kerja yang efektif - Memastikan kinerja komunitas meliputi kombinasi dari kegiatan membangun hubungan, pembelajaran, dan aksi. - Melaksanakan pendekatan partisipatif dan dapat diukur untuk mendukung pembuatan keputusan dan perencanaan anggaran. Hambatan - Metodologi untuk mengukur dampak terhadap hasil di dunia nyata. Sebuah kombinasi pendekatan digunakan termasuk kisah-kisah kualitatif dan survey reguler untuk mengidentifikasi perkembangan dan tantangan.⁷
[<https://sdgs.un.org/partnerships/sdg-hub-global-sdgs-network-innovation-and-impact>]

Kinerja sebuah *knowledge hub* SDGs perlu memiliki beberapa komponen inti seperti di bawah ini agar memperoleh hasil yang diharapkan.

1. **Sumber daya manusia**, yang dapat terdiri dari seorang koordinator yang mengawal operasionalisasi dan memantau kebutuhan *knowledge hub*. Koordinator tersebut memiliki pemahaman yang cukup dan akses yang baik terkait SDGs, tersambung dalam jejaring dengan para aktor pemerintah dan nonpemerintah, cukup memahami pengelolaan pengetahuan serta fungsi komunikasi dan koordinasi. Dalam tugasnya sehari-hari, koordinator tersebut berkoordinasi dengan staf administrasi dan teknis. Bila memungkinkan, *knowledge hub* memiliki personil bidang komunikasi dan IT, namun dapat juga berkoordinasi dengan bidang atau unit lain, seperti humas atau IT.

⁷ "Kondisi pemungkinkan berikut ini sangat penting: - Setidaknya satu pemimpin penuh waktu yang berdedikasi untuk memfasilitasi komunitas praktik sangatlah penting - Komitmen pendanaan setidaknya selama tiga tahun untuk mengubah praktik dari konsep menjadi model kerja yang efektif - Memastikan komunitas bekerja dalam kombinasi aktivitas membangun hubungan, pembelajaran, dan tindakan. - Menerapkan pendekatan partisipatif dan adil dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Kendala - Metodologi untuk mengukur dampak terhadap hasil di dunia nyata. Campuran pendekatan digunakan termasuk kisah kasus kualitatif dan survei rutin untuk mengidentifikasi kemajuan dan tantangan."

2. **Konten dan jejaring**, yakni database pengetahuan yang berkaitan dengan SDGs, termasuk regulasi, panduan, kajian-kajian, publikasi, format dan template, serta praktik baik dan aktor yang telah diinventarisasi dan terverifikasi, termasuk informasi tentang lokasi, para pelaku dan narahubung, jejaring yang siap untuk berkolaborasi. Jejaring termasuk lembaga-lembaga yang juga siap untuk mendukung pendanaan, peningkatan kapasitas, kemitraan, dan sebagainya.
3. **Tempat penyimpanan (storage)** untuk menyimpan referensi dan pengetahuan SDG yang akan bertambah dan memerlukan tempat penyimpanan yang aman. Tempat penyimpanan tersebut bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh yang memiliki wewenang.
4. **Platform** berfungsi sebagai ruang kolaborasi interaktif berbentuk digital untuk menyebarkan pengetahuan SDGs yang telah tervalidasi, dapat menjangkau dan dijangkau oleh audiens di manapun dengan mudah. *Knowledge hub* SDGs dapat memanfaatkan platform yang sudah ada, seperti website, media sosial, dsb., tanpa membuat yang baru. Informasi terkait pengetahuan SDGs dapat diberikan penambahan menu.
5. **Anggaran** rutin tentunya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan teknis sehari-hari, seperti SDM, kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pertemuan yang bersifat tatap muka, dsb. Anggaran *knowledge hub* SDGs juga bisa berbasis kegiatan yang dikerjasamakan dengan aktor pembangunan lain, misalnya lomba SDGs, program berbasis kemitraan multi pihak, workshop atau pameran, dsb.

2.4. Contoh *Knowledge Hub* SDGs

Sebagai ilustrasi, *knowledge hub* SDGs yang dapat dijadikan rujukan adalah Sekretariat Nasional SDGs yang merupakan pusat rujukan nasional maupun global terkait informasi SDGs Indonesia. *Knowledge hub* tingkat daerah dapat mempelajari jenis informasi yang perlu dikumpulkan di tingkat daerah untuk mendukung pengetahuan SDGs di platform nasional tersebut. Berikut adalah tampilan dari platform Sekretariat Nasional SDGs <https://sdgs.bappenas.go.id/> yang menyajikan beragam referensi dan panduan yang dapat diakses secara terbuka. Contoh *knowledge hub* SDGs lainnya dapat dilihat di Lampiran 1.



Gambar 3. Halaman depan website SDGs Indonesia



Gambar 4. Menu dokumen-dokumen referensi SDGs



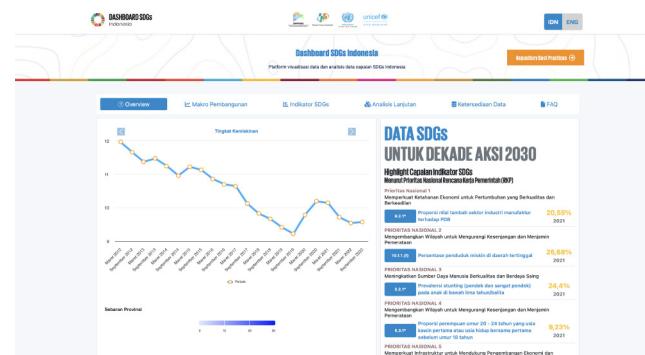
Gambar 5. Dokumen-dokumen referensi SDGs: regulasi SDGs



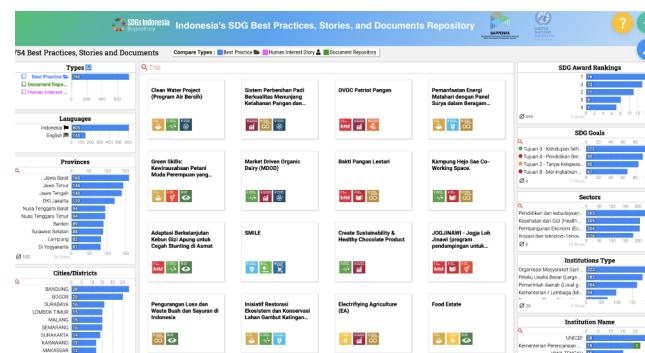
Gambar 6. Dokumen referensi SDGs: RAD tiap provinsi



Gambar 7. Dokumen referensi SDGs lainnya



Gambar 8. Dashboard SDGs berisi data-data termutakhirkan



Gambar 9. Menu praktik baik SDGs berdasarkan kategori



Gambar 10. Artikel berisi kabar terkini SDGs Indonesia di panggung nasional maupun global

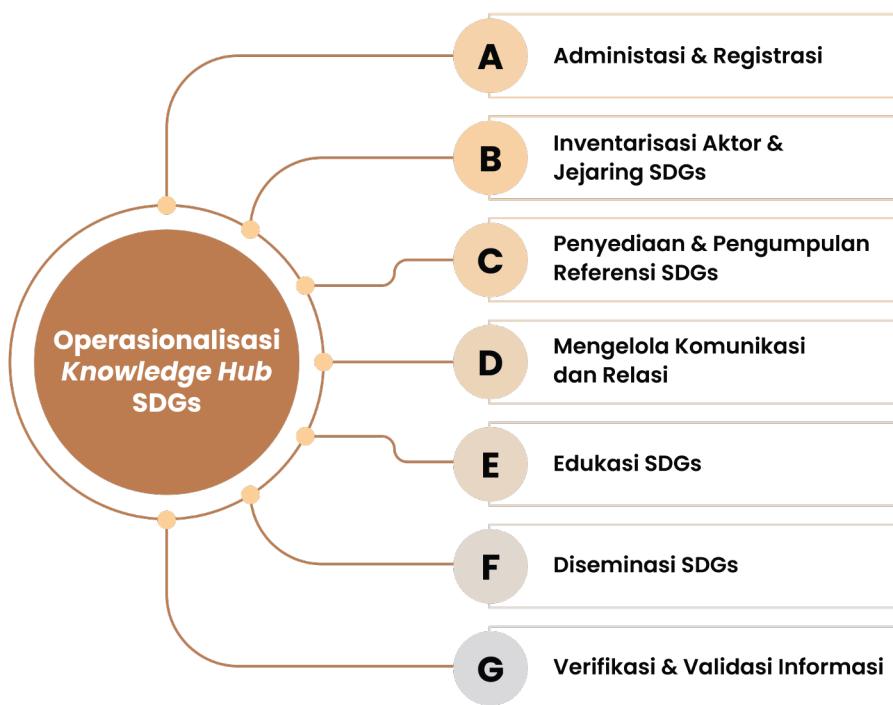


3

OPERASIONALISASI KNOWLEDGE HUB SDGs



Bagian ini menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan agar *knowledge hub* SDGs memenuhi fungsinya dan tersinergi dengan *knowledge hub* SDGs tingkat nasional. Poin-poin di bawah ini dapat dilakukan secara individu dan sukarela, dengan terpenuhinya **administrasi dan registrasi** oleh pengguna *knowledge hub* yang ingin berkontribusi aktif.



Gambar 11. Operasionalisasi *Knowledge Hub* SDGs

3.1. Administrasi dan Registrasi⁸

Pengguna *knowledge hub* SDGs dapat dibagi dua (2), yakni pengguna aktif yang ingin berkontribusi terhadap database *knowledge hub* SDGs, dan pengguna pasif yang hanya akan membaca dan mencari pengetahuan tentang SDGs tanpa berkontribusi. Pengguna aktif melakukan registrasi dengan mengisi informasi dasar tentang lembaganya, satu lembaga satu entri. Registrasi lembaga tersebut perlu diverifikasi dengan menyertakan data-data resmi lembaga. Informasi yang perlu disampaikan saat registrasi adalah **nama lembaga, jenis lembaga, email lembaga, tautan website dan/atau media sosial lembaga, jumlah pengurus laki-laki dan**

⁸ Referensi menggunakan form pendaftaran SDGs Action Award 2022

perempuan, nama dan nomor telepon personil yang melakukan registrasi, serta dokumen pendirian lembaga.

Pengguna reguler cukup melakukan registrasi dengan mengisi **nama dan email** pribadi atau lembaga. Data yang disampaikan di sini menjadi database yang disimpan secara tertutup dan rahasia oleh *knowledge hub* SDGs. Lembaga yang telah melakukan registrasi dan terverifikasi, dapat berkontribusi secara aktif bagi *knowledge hub* SDGs terkait, termasuk menyampaikan praktik baik maupun artikel tentang kegiatan SDGs lembaga.

3.2. Inventarisasi Aktor dan Jejaring SDGs

Inventarisasi ini melengkapi database aktor yang telah berkontribusi terhadap capaian SDGs, termasuk aktor nonpemerintah, dan jejaring yang berpotensi menjadi mitra kerja dalam kegiatan-kegiatan SDGs. Sumber informasi dapat berasal dari registrasi pengguna *knowledge hub* SDGs atau survey data aktor dan jejaring. Inventarisasi aktor dan jejaring SDGs dikelompokkan secara otomatis berdasarkan kategori jenis lembaga dan disimpan dalam repository data aktor SDGs.

Inventarisasi aktor dan jejaring SDGs menghasilkan database lembaga yang telah berkontribusi terhadap capaian SDGs serta lembaga yang berpotensi untuk menjadi mitra kerjasama. Akses terhadap informasi lembaga adalah rahasia dan hanya menjadi wewenang pengelola *knowledge hub* SDGs.

3.3. Penyediaan dan Pengumpulan Referensi Tentang SDGs

Referensi tentang SDGs yang dikumpulkan bersumber dari tingkat nasional maupun daerah untuk mengisi bank literasi SDGs yang akan disajikan oleh *knowledge hub* bagi penggunanya. Jenis-jenis referensi yang dikumpulkan sebagai literasi SDGs adalah regulasi, referensi, pedoman teknis, rencana aksi, laporan, kajian, praktik-praktik baik, materi sosialisasi.

Seluruh referensi berbentuk tulisan disimpan harus dokumen final, bukan draft, dalam format pdf untuk dapat dibuka dan diunduh oleh pengguna. Regulasi yang disimpan merupakan versi yang telah disahkan, pedoman, laporan, kajian, dan materi sosialisasi merupakan versi untuk dipublikasi. Praktik baik yang disimpan hanya yang telah divalidasi, dan dapat berbentuk narasi (teks praktik baik berdasarkan

format praktik baik⁹, fact sheet, brosur, dsb) dan/atau visual (video, poster, dsb).

Dokumen dan materi yang telah dikumpulkan akan tersimpan dalam *repository knowledge hub* SDGs terkait. Referensi yang telah lolos verifikasi dapat dipublikasikan oleh *knowledge hub* dan dapat diakses oleh pengguna.

3.4. Mengelola Komunikasi dan Relasi Antara Aktor dan Dengan Jejaring

Data dan informasi aktor dan jejaring dapat digunakan untuk memfasilitasi pembentukan kerjasama multipihak. Inventarisasi aktor dan jejaring memastikan bahwa aktor dan jejaring tersebut telah berkegiatan untuk mendukung SDGs. Setiap aktor maupun jejaring memiliki dan telah mempublikasikan praktik baik terkait SDGs yang dapat digunakan sebagai credential dalam proses pembentukan kerjasama multi pihak.

Knowledge hub SDGs juga menyediakan data dan praktik baik yang telah terformat yang dapat digunakan untuk melengkapi laporan (laporan monev, laporan tahunan, VNR/VLR/VSR). Pembuat laporan dapat mencari informasi dan format-format untuk mendukung laporan.

3.5. Edukasi SDGs

Edukasi SDGs sangat diperlukan karena masih banyak aktor yang belum mengenal SDGs. *Knowledge hub* SDGs menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa yang lebih mengutamakan adanya contoh sukses dari aktor lain dan pembelajaran mandiri yang dapat diambil manfaatnya untuk mendukung pekerjaannya. Peningkatan kapasitas SDGs dapat dilakukan dengan mempelajari praktik baik SDGs yang ada dalam *knowledge hub* sehingga pengguna terkait mendapatkan contoh dari suatu praktik SDGs. *Knowledge hub* juga dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan untuk membuat materi-materi pembelajaran singkat (micro learning) yang berisi pengetahuan-pengetahuan teknis tertentu secara spesifik.

Mitra-mitra kerjasama dalam pengembangan edukasi SDGs seperti SDG Academy dan SDG Center memiliki sumber daya berupa manusia maupun ilmu

⁹ Format, tata cara pendokumentasian, dan contoh layout praktik baik dijelaskan di Lampiran 2. Format tersebut merupakan pengembangan dari Form 6 yang terdapat dalam Panduan Monitoring dan Evaluasi.

berbasis subyek yang dapat mendukung *knowledge hub* dalam membuat dan mempromosikan materi-materi edukasi. *Knowledge hub SDGs* menyediakan menu bagi pengguna untuk melakukan pembelajaran mandiri. Kerjasama dengan SDG Center dapat mendorong terbentuknya pelatihan bersertifikat.

3.6. Diseminasi SDGs

Knowledge hub mengoordinasikan dan memfasilitasi penyebaran dan pertukaran pengetahuan SDGs, misalnya lokakarya berbagi pengetahuan SDGs untuk ekonomi hijau, atau sebagai bagian dari forum lain, seperti Musrenbang atau forum-forum nasional/internasional, misalnya *High Level Political Forum* (HLPF) atau platform praktik baik SDGs UN-DESA. Pengetahuan yang disebarluaskan digunakan untuk menginspirasi peserta forum, dimanfaatkan sebagai informasi dalam perencanaan program, misalnya untuk mendorong replikasi serta mempromosikan aset pengetahuan daerah. Diseminasi SDGs dilakukan untuk melakukan sosialisasi regulasi terbaru atau kegiatan SDGs baru, mempromosikan praktik baik dan aktor (yang baru tervalidasi dalam minggu/bulan berjalan), sharing tematik antar aktor (yakni wilayah, sektor, goal/indikator SDGs) (webinar, workshop, seminar, dsb), informasi event-event SDGs (nasional & global).

Beberapa metode penyebaran dan pertukaran pengetahuan yang dapat dilakukan oleh *knowledge hub* adalah sebagai berikut:

1. Disebarkan di media *online* resmi *knowledge hub* sebagai sosialisasi perkembangan terbaru SDGs, misalnya kebijakan-kebijakan dan/atau program baru K/L atau korporasi tingkat nasional. Media yang digunakan dapat berupa website, media sosial, termasuk Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan lainnya, ulasan-ulasan tematik di Podcast, Clubhouse, dsb, YouTube, maupun *chat groups*, antara lain WhatsApp, Facebook Groups, dsb.
2. Digunakan dalam forum-forum pengetahuan, baik formal dan informal, seperti FGD tematik, lokakarya atau seminar untuk pendalaman dan *sharing* pengetahuan SDGs.
 - A. *Community of Practice* (CoP) adalah forum pengetahuan yang paling mudah dibentuk dengan mempersatukan para aktor yang berkegiatan di bidang yang sama.
 - B. Contoh CoP yang telah banyak dilakukan antara lain WhatsApp Group pelaku pengelola pengetahuan di Kenya, *Brown Bag Lunch* per tiga bulan Kantor Bank Dunia Jakarta, atau *coffee morning* antara pengelola proyek.
 - C. Peserta CoP menentukan tema atau topik bahasan dan telah memiliki konsep tindak lanjut.
 - D. CoP juga dapat menjadi embrio kerjasama multi pihak dan mendorong

- pelibatan aktor nonpemerintah serta kaum pemuda dan marginal yang perannya perlu dipromosikan.
3. Sesi sharing tingkat eksekutif antara pimpinan lembaga pemerintah dengan pimpinan perusahaan, baik di tingkat pusat maupun cabang. Kegiatan ini mendorong terjadinya diskusi tingkat tinggi tentang suatu pengetahuan SDGs baru, dan menghasilkan rencana kerja.
 4. Fasilitasi kunjungan tematik ke lokasi praktik baik, termasuk kunjungan ke aktor nonpemerintah atau sekretariat SDGs, untuk mendengarkan dan melihat langsung praktik-praktik pelaksanaan SDGs.
 5. Publikasi massal di media massa sangat diperlukan karena dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan media lokal yang memberikan perhatian terhadap isu pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan membuat talk show atau peliputan sebagai upaya mempromosikan suatu pengetahuan SDGs.
 6. Untuk menjangkau kaum pemuda, *knowledge hub* dapat melakukan kerjasama dengan influencer lokal yang memiliki perhatian terhadap pembangunan dan memiliki reputasi yang positif.

3.7. Validasi Informasi

Semua pengetahuan yang terkumpul oleh *knowledge hub* SDGs harus telah divalidasi sebelum dipublikasikan. Proses validasi dapat dilakukan secara berjenjang, dimulai dari kontributor sebagai validasi tahap pertama atau oleh *knowledge hub* SDGs di tingkat terendah. Dengan demikian, pengetahuan yang telah dipublikasikan di *knowledge hub* SDGs dapat dipertanggungjawabkan informasi kebenarannya.

Berikut adalah contoh daftar pertanyaan validasi pengetahuan SDGs. Contoh ini dapat digunakan sebagai dasar dan dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan *knowledge hub*. Penilaian validitas dilakukan berdasarkan terisinya jawaban 'Ya'. Bila seluruh jawaban adalah 'Ya', pengetahuan tersebut valid. Bila ada jawaban 'Tidak' dari satu atau lebih pertanyaan, pengetahuan yang disampaikan perlu dikaji ulang atau diklarifikasi kembali kepada yang telah menyampaikan.

Tabel 1. Contoh daftar pertanyaan validasi pengetahuan SDGs

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah pengetahuan yang disampaikan merupakan pengetahuan baru?		
Apakah pengetahuan tersebut menjawab kebutuhan suatu isu dalam pelaksanaan SDGs?		

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah pengetahuan yang disampaikan benar berdasarkan ilmu dan fakta?		
Apakah pengetahuan telah disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham?		
Apakah bentuk dokumen telah memenuhi syarat-syarat komunikasi SDGs?		
Apakah pengetahuan disampaikan oleh pengguna <i>knowledge hub</i> yang sudah teregistrasi dan terverifikasi?		
Apakah pengetahuan dapat digunakan oleh publik?		
Apakah nama dan nomor telepon yang menyampaikan pengetahuan jelas dan valid?		

Catatan: format ini adalah contoh. Daftar pertanyaan dapat dibuat dengan lebih teknis dan spesifik sesuai konteks pengetahuan dan kebutuhan.



4

MONITORING DAN EVALUASI KNOWLEDGE HUB SDGs



Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan capaian rencana kerja dan mengidentifikasi pembelajaran atas operasionalisasi *knowledge hub* yang perlu ditingkatkan. Monitoring dapat dilakukan setiap kuartal atau bersamaan dengan waktu pembuatan laporan monev. Evaluasi idealnya dilakukan setiap tahun untuk melihat sejauh mana *knowledge hub* telah mencapai tujuan kerjanya dan umpan balik untuk penyebaran pengetahuan SDGs yang lebih efektif.

Hal-hal yang perlu menjadi fokus dalam memonitor dan mengevaluasi *knowledge hub* SDGs adalah:

1. Peningkatan jumlah aktor yang berpartisipasi dalam *knowledge hub* SDGs, dilihat dari jumlah anggota yang aktif (misalnya di *chat group*, media sosial, dsb);
2. Peningkatan jumlah kerjasama multi pihak sesuai panduan KMP;
3. Jumlah praktik baik yang terkumpul secara periodik (yakni semester, trimester, tahunan);
4. Replikasi, promosi, pertukaran praktik baik yang terjadi;
5. Kegiatan-kegiatan yang berhasil dilaksanakan berkat fasilitasi dan koordinasi *knowledge hub*;
6. Hambatan aktivitas dan interaksi di *platform SDGs*;
7. Eksistensi SDGs dan *knowledge hub* di ranah publik, antara lain berdasarkan publikasi cetak, visual, dan maya oleh media;
8. Efektifitas anggaran terhadap kegiatan;
9. Dsb.



5

KEBERLANJUTAN KNOWLEDGE HUB SDGs



Keberlanjutan *knowledge hub* berarti mekanisme kerja yang telah terbangun akan terus berlangsung, dengan atau tanpa adanya isu SDGs, karena pembangunan akan tetap berjalan. Hal ini berkaitan dengan fungsi-fungsi koordinatif *knowledge hub*, seperti pengumpulan praktik-praktik baik pembangunan, fasilitasi komunikasi antara para pihak, menjembatani terjadinya kerjasama antara berbagai lembaga, dan sebagainya. Untuk itu, beberapa hal berikut perlu menjadi pertimbangan ketika menjalankan sebuah *knowledge hub*.

5.1. Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran *knowledge hub* SDGs sebaiknya tidak lepas dari perencanaan anggaran tim koordinasi dan/atau sekretariat SDGs. Rencana kerja dan anggaran *knowledge hub* SDGs dapat dibuat berdasarkan kegiatan yang bersifat rutin maupun ide baru, terutama bagi kegiatan telah menunjukkan hasil dan dampak. Kegiatan yang telah berjalan juga dapat mengidentifikasi kegiatan atau program yang dapat dikerjasamakan dengan aktor lain sehingga rencana kerja tersebut menjadi dasar pembuatan dan pengajuan anggaran.

5.2. Dukungan Politik

Keberlanjutan *knowledge hub* SDGs membutuhkan dukungan kebijakan atau regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan atau regulasi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan para pelaku untuk memprioritaskan keberadaan dan peran *knowledge hub* SDGs walaupun SDGs telah berakhir pada tahun 2030. Selain itu, kebijakan atau regulasi tersebut dapat dijadikan rujukan bagi para pelaku untuk mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan akan peningkatan kontribusi dan hasil *knowledge hub*, termasuk peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusianya.

Sebagai penutup, berikut adalah testimoni tentang pentingnya pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembaruan kebijakan.



Panduan Praktis
Operasional Pengelolaan Pengetahuan SDGs Indonesia
Untuk Mendukung Pelokalan SDGs



Kementerian PPN/
Bappenas



implemented by:
giz
Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH